

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Konsepsi Hukum Persaingan Usaha	11
1. Tujuan Perlindungan Persaingan Usaha	11
2. Pengaturan Hukum Persaingan Usaha	15
B. Konsep Perjanjian dalam Hukum Persaingan Usaha	17
1. Pengertian Perjanjian	17
2. Konsep Perjanjian Horizontal dan Perjanjian Vertikal	19
2.1 Perjanjian Horizontal	19
2.2 Perjanjian Vertikal	21
3. Perjanjian Yang Dilarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	22
3.1 Perjanjian Tertutup	24
3.2 Bentuk-bentuk Perjanjian Tertutup	26
C. Metode Pendekatan Dalam Hukum Persaingan Usaha	27
1. Pendekatan Per Se Illegal	27
2. Pendekatan Rule of Reason	30
D. Pengecualian Dalam Hukum Persaingan Usaha	32

BAB III	: METODE PENELITIAN	36
A.	Metode Penelitian	36
B.	Lokasi Penelitian	37
C.	Jenis Penelitian	37
D.	Objek Penelitian	38
E.	Subjek Penelitian	39
F.	Data Penelitian	39
G.	Teknik Pengumpulan Data	41
H.	Analisis Data	41
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A.	Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013 tentang Pelaksanaan Layanan Electronic Point Of Sales (e-POS) oleh PT Angkasa Pura II (Persero) Menurut UU No.5 Tahun 1999	43
1.	Kasus Posisi Pelaksanaan e-POS	43
2.	Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan e-POS	48
3.	Amar Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013	50
4.	Upaya Hukum Keberatan PT Angkasa Pura II (Persero) atas Putusan Nomor 07/KPPU-I/2013	52
4.1	Upaya Hukum Keberatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	52
4.2	Keberatan PT Angkasa Pura II (Persero) atas Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013	53
5.	Amar Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 01/Pdt.G/KPPU/2014/PN.Bdg	57
6.	Hal-hal Yang Diperhatikan Terkait Dengan Analisis Pelarangan Perjanjian Tertutup	58
B.	Pengecualian Hukum Anti Monopoli Terhadap BUMN Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	63
1.	Badan Usaha Milik Negara	63
1.1	Pengertian, Peran dan fungsi BUMN	63
1.2	Jenis atau Bentuk Badan Usaha Milik Negara	65
2.	Monopoli oleh BUMN Sebagai Yang Dikecualikan	67

BAB V	:	PENUTUP	76
	A.	Kesimpulan	76
	B.	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA			xi
LAMPIRAN			